

**Pengetahuan Perpajakan, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Sanksi Perpajakan,
Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang
Pribadi (KPP Pratama Mataram Barat)**

¹Kadek Sindi Juniantara, ²Endang Kartini, ³Herawati Khotmi

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM, ³Universitas Mataram

¹sindijuniantari@gmail.com, ²endangkartini979@gmail.com, ³khotmi.2084@gmail.com

Abstract

This study aims to determine how the knowledge of taxation, accountability of public services, tax sanctions, and taxpayer awareness of the level of individual tax compliance at the KPP Pratama. This study uses a descriptive associative approach questionnaires are distributed to individual taxpayers at the IKPP Pratama. The number of samples is 100 registered. Multiple regression analysis is the method used in this study. The descriptive results of the study show that taxpayer knowledge, public service accountability, and tax sanctions do not significantly influence individual taxpayer compliance at the West Mataram Tax Office (KPP Pratama). Conversely, taxpayer awareness has a significant impact on individual taxpayer compliance at the West Mataram Tax Office (KPP Pratama).

Keywords: tax knowledge; public service accountability; tax sanctions; tax awareness; and tax compliance.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menentukan bagaimana pengetahuan tentang perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak orang pribadi di KPP Pratama Mataram Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif asosiatif, kuesioner dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Mataram Barat. Jumlah sampel sebanyak 100 yang terdaftar. Analisis regresi berganda adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil deskriptif penelitian menunjukkan pengetahuan wajib pajak, akuntabilitas pelayanan publik, dan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Mataram Barat. Sebaliknya, kesadaran wajib pajak berdampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Mataram Barat.

Kata kunci: pengetahuan pajak; akuntabilitas pelayanan publik; sanksi pajak; kesadaran pajak; dan kepatuhan pajak.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sebagian dari pendapatan negara karena dapat membantu kemajuan pembangunan nasional, meningkatkan kualitas hidup rakyat, dan mengurangi kemiskinan. Dana ini dapat diakses dari penerimaan pajak, dan masyarakat dapat membantu pembangunan nasional dengan membayar pajak mereka sendiri. Pajak yaitu partisipasi wajib yang diberikan negara untuk individu atau badan yang diwajibkan

oleh UU. Pendapatan Pajak sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan negara, memenuhi kebutuhan belanja negara, dan mengatur keseimbangan ekonomi, termasuk mengendalikan inflasi dan deflasi. Jika wajib pajak tidak membayar kewajibannya akan mendapatkan sanksi pajak. Menurut berita DDTC News pada tanggal 29 Juni 2021, KPK meminta enam pemda Lombok Barat, Bima, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa Barat, dan Sumbawa untuk melakukan penagihan aktif piutang pajak. Nilai piutang masing-masing pemda mencapai 165,7 miliar pada tahun 2020. Menurut Menurut LPPD Kabupaten Bima tahun 2020, menerima pajak daerah tahun 2020 tidak memenuhi sasaran, menurut suara NTB.com. Perolehan pajak daerah di Kabupaten Bima & Kota Mataram turun sebesar 36% pada tahun 2020. Selain itu, target penerimaan pajak daerah di Lombok Utara dan Lombok Barat pada tahun 2019 tidak tercapai (Fajriana, 2022).

Tabel 1.1 Jumlah wajib pajak pribadi di KPP Pratama Mataram Barat Tahun 2020 S/D 2023

No	Tahun	WP Yang Terdaftar	WP Yang Melapor	Persentase
1	2020	124.587	50.016	52,15%
2	2021	145.526	47.993	32,98%
3	2022	148.420	43.812	30,11%
4	2023	154.989	46.854	31,57%
Jumlah		573.552	188.674	

METODE PENELITIAN

Penelitian ini digunakan kuantitatif asosiatif, yaitu akibat yang dihasilkan oleh variabel Pengetahuan Perpajakan X1, Akuntabilitas Pelayanan Publik X2, Sanksi Perpajakan X3 dan Kesadaran Wajib Pajak X4 berhubungan dengan variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Peneliti mengumpulkan data dengan penyebaran kuesioner. Skala Likert untuk mengukur variabel penelitian ini.

Seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Mataram Barat berjumlah 154.989 orang sebagai subjek penelitian ini. Penggunaan pengambilan sampel secara tidak sengaja Sampel ditentukan dengan rumus Slovin. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dari kuesioner disebarkan kepada Wajib Pajak Orang

Pribadi di KPP Pratama Mataram Barat. Data primer digunakan sebagai sumber data untuk penelitian ini. Peneliti menggunakan metode analisis regresi linear berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi data responden

Responden berdasarkan jenis kelamin

Tabel 2 Responden berdasarkan jenis kelamin

Jenis	Jumlah	%
Wanita	59	59%
Pria	41	41%
Total	100	100%

Data di atas, populasi responden terbesar penelitian ini yaitu wanita, yang berjumlah 59 orang yakni 59%. Responden pria berjumlah 41 orang, atau 41%. Dapat disimpulkan mayoritas responden terbanyak wanita.

Responden berdasarkan usia

Tabel 3 Responden berdasarkan usia

Umur	Total	Persentase
<20	4	4%
21-30	27	27%
31-40	58	58%
<50	11	11%
Total	100	100%

Berdasarkan informasi primer tersebut dibuat kesimpulan responden wp di KPP Pratama Mataram Barat adalah usia di bawah 20 tahun, sejumlah 4 orang, Usia antara 21 dan 30 tahun, berjumlah 27 orang, sedangkan 31 dan 40 tahun, sebanyak 58 orang dan usia di bawah 50 tahun, sejumlah 11 orang.

Responden berdasarkan pendidikan

Tabel 4 Responden ipendidikan

Pendidikan	Jumlah	Persentase
SMK/SMA	9	9%
D3	22	22%
S1	64	64%
S2	5	5%
Total	100	100%

Sesuai dengan tabel diatas terlihat pendidikan terakhir responden masing- masing SMA/SMK berjumlah 9 orang, jumlah persentase 9%, D3 berjumlah 22 orang persentase berjumlah 22% selanjutnya pendidikan terakhir S1 berjumlah 64 orang dengan angka persentase 64% dan S2 berjumlah 5 orang dengan jumlah persentase 5%. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden pendidikan terakhir yang terbanyak yaitu S1.

Responden berdasarkan pekerjaan

Tabel 5 Responden iberdasarkan ipekerjaan

Pekerjaan	Jumlah	Persen
Karyawan negri	24	24%
Pegawai swasta	42	42%
Wirausaha	16	16%
Pegawai BUMN	10	10%
Lainnya	8	8%
Total	100	100%

Menurut tabel pendidikan menyatakan sabagian besar pekerjaan responden adalah pegawai negri yang berjumlah 24 orang dengan persentase 24%, sedangkan pegawai swasta mencapai 42 orang, persen 42%, wirausaha berjumlah 16 orang dengan jumlah persentase 16% selanjutnya pegawai BUMN dengan jumlah 10 orang persentase sebanyak 10% dan lainnya sebanyak 8 orang dengan jumlah persentase 8%.

Analisis Data

Uji Deskriptif

Tabel 6 Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Perpajakan	100	2.43	4.00	3.3757	.32656
Akuntabilitas Pelayanan Publik	100	2.17	4.00	3.2717	.40108
Sanksi Perpajakan	100	2.25	4.00	3.2250	.37856
Kesadaran Wajib Pajak	100	1.90	4.00	3.2770	.35301
Kepatuhan Wajib Pajak	100	2.20	4.00	3.3400	.40151
Valid N (listwise)	100				

Menurut daftar tabel 6 nilai minimum dari pengetahuan perpajakan adalah 2,43, nilai maksimum 4,00, rata sebanyak 3,37, standar deviasinya bernilai 0,326. Angka minimum variabel akuntabilitas pelayanan publik adalah 2,17, maksimum sebesar 4,00, rata-rata sebesar 3,27, dan standar deviasi 0,401. Nilai minimum sanksi perpajakan 2,25, nilai maksimum sebanyak 4,00, rata-ratanya 3,22, standar untuk deviasi 0,378.

Uji Validitas

Tabel 7 Uji Validitas

No	Indikator	Variabel	r hitung	r tabel	Keterangan
1	Pengetahuan Perpajakan (X1)	X1.1	0,552	0,1966	Valid
		X1.2	0,618	0,1966	Valid
		X1.3	0,439	0,1966	Valid
		X1.4	0,394	0,1966	Valid
		X1.5	0,667	0,1966	Valid
		X1.6	0,675	0,1966	Valid
		X1.7	0,582	0,1966	Valid
2	Akuntabilitas Pelayanan (X2)	X2.1	0,644	0,1966	Valid
		X2.2	0,715	0,1966	Valid
		X2.3	0,700	0,1966	Valid
		X2.4	0,664	0,1966	Valid
		X2.5	0,648	0,1966	Valid
		X2.6	0,688	0,1966	Valid
3	Sanksi Perpajakan (X3)	X3.1	0,498	0,1966	Valid

		X3.2	0,497	0,1966	Valid
		X3.3	0,491	0,1966	Valid
		X3.4	0,667	0,1966	Valid
		X3.5	0,635	0,1966	Valid
		X3.6	0,556	0,1966	Valid
		X3.7	0,597	0,1966	Valid
		X3.8	0,632	0,1966	Valid
		X4.1	0,443	0,1966	Valid
		X4.2	0,522	0,1966	Valid
		X4.3	0,641	0,1966	Valid
		X4.4	0,632	0,1966	Valid
4	Kesadaran Wajib Pajak (X4)	X4.5	0,500	0,1966	Valid
		X4.6	0,419	0,1966	Valid
		X4.7	0,547	0,1966	Valid
		X4.8	0,589	0,1966	Valid
		X4.9	0,647	0,1966	Valid
		X4.10	0,625	0,1966	Valid
		Y1	0,763	0,1966	Valid
		Y2	0,725	0,1966	Valid
5	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y3	0,709	0,1966	Valid
		Y4	0,628	0,1966	Valid
		Y5	0,724	0,1966	Valid

Sehingga r hitung lebih besar dari rtabel, memiliki nilai 0,1966, semua indikator penelitian ini valid, ditunjukkan pada tabel di atas.

Uji Reabilitas

Tabel 8 Uji iReabilitas

No	Variabel	Cronbeach alpha	rtabel	Ket
1	Pengetahuan Perpajakan	0,645	0,60	Realiabel
2	Akuntabilitas Pelayanan Publik	0,757	0,60	Realiabel
3	Sanksi Perpajakan	0,686	0,60	Realiabel
4	Kesadaran Wajib Pajak	0,755	0,60	Realiabel
5	Kepatuhan Wajib Pajak	0,754	0,60	Realiabel

Tabel di atas menyatakan variabel dianggap handal atau dapat diandalkan sebagai alat ukur.

Uji iNormalitas

Tabel 9 Uji iNormalitas

		Unstandardized Residual	
N		100	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	.36239383	
Most Extreme Differences	Absolute	.071	
	Positive	.066	
	Negative	-.071	
Test Statistic		.071	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	.253	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.241
		Upper Bound	.264

a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.
 c. Lilliefors Significance Correction.
 d. This is a lower bound of the true significance.
 e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 299893525.

Hasil uji Kolmogrov-Smirnov menentukan Asymp. Sig. (2-tailed) 0,200 melebihi dari 0,05, yang menunjukkan data berdistribusi normal. Sesuai dengan pedoman uji normalitas Kolmogrov-Smirnov dan menunjukkan anggapan/persyaratan normalitas dengan uji regresi telah dipenuhi.

Uji iMultikolinieritas

Tabel 10 Uji iMultikolinieritas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.000	.557		1.798	.075		
	PengetahuanPerpajakan	.202	.123	.164	1.645	.103	.858	1.165
	AkuntabilitasPelayananPublik	.126	.095	.126	1.325	.188	.943	1.061
	SanksiPerpajakan	.003	.137	.003	.021	.983	.510	1.960
	KesadaranWajibPajak	.377	.147	.331	2.570	.012	.517	1.935

a. Dependent Variable: KepatuhanWajibPajak

Hasil uji multikolinieritas, berdasarkan data di atas, adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan perpajakan memiliki nilai tolerance sebesar $0,858 > 0,10$ dan nilai VIF $1,165 < 10$, maka tidak terjadi multikolinieritas.
2. Akuntabilitas pelayanan publik memiliki nilai tolerance sebesar $0,943 > 0,10$ dan nilai VIF $1,061 < 10$, maka tidak terjadi multikolinieritas.
3. Sanksi perpajakan memiliki nilai tolerance sebesar $0,510 > 0,10$ dan nilai VIF $1,960 < 10$, maka tidak terjadi multikolinieritas.

4. Kesadaran wajib pajak memiliki nilai tolerance sebesar $0,517 > 0,10$ dan nilai VIF $1,935 < 10$, maka tidak terjadi multikolinieritas.

Dari empat variabel bebas tersebut tidak terindikasi terjadinya multikolinieritas terhadap data yang akan diujikan.

Dari empat variabel bebas tersebut tidak terindikasi terjadinya multikolinieritas terhadap data yang akan diujikan.

Uji iHeteroskedastitas

Tabel 11 Uji iHeteroskedastitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.547	.351		1.557	.123		
	PengetahuanPerpajakan	.092	.078	.127	1.182	.240	.858	1.165
	AkuntabilitasPelayananPublik	-.019	.060	-.033	-.320	.749	.943	1.061
	SanksiPerpajakan	-.164	.087	-.264	-1.894	.061	.510	1.960
	KesadaranWajibPajak	.003	.092	.005	.034	.973	.517	1.935

a. Dependent Variable: ABS

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 12 Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.000	.557		1.798	.075		
	PengetahuanPerpajakan	.202	.123	.164	1.645	.103	.858	1.165
	AkuntabilitasPelayananPublik	.126	.095	.126	1.325	.188	.943	1.061
	SanksiPerpajakan	.003	.137	.003	.021	.983	.510	1.960
	KesadaranWajibPajak	.377	.147	.331	2.570	.012	.517	1.935

a. Dependent Variable: KepatuhanWajibPajak

$$Y = 1,000 + 0,202X_1 + 0,126X_2 + 0,003X_3 + 0,377X_4$$

- a) Nilai konstanta 1.000 menentukan variabel independen, gagal memenuhi peraturan pajak.
- b) Pengetahuan perpajakan mengalami satu satuan, menurut koefisien variabel pengetahuan perpajakan $(b_1) = 0,202$. Akibatnya, kepatuhan meningkat sebesar 0,202

- c) Adanya asumsi variabel konstan. Karena nilai koefisien akuntabilitas pelayanan publik (b_2) = 0,126 yaitu nilai akuntabilitas pelayanan publik meningkat satu satuan, karena itu variabel kepatuhan wp bertambah 0,126.
- d) Menurut koefisien variabel X3 (b_3) = 0,003, oleh karena itu ketaatan wp meningkat 0,003 dgn asumsi variabel setabil.
- e) Koefisien variabel kesadaran WP (b_4) adalah 0,337, yang menyatakan bahwa jika nilai kepatuhan wp penambahan satu satuan, mengalami kenaikan sebesar 0,337.

Uji Hipotesis

Hasil Uji t (Parsial)

Tabel 13 Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Coefficients Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.000	.557		1.798	.075		
	PengetahuanPerpajakan	.202	.123	.164	1.645	.103	.858	1.165
	AkuntabilitasPelayananPublik	.126	.095	.126	1.325	.188	.943	1.061
	SanksiPerpajakan	.003	.137	.003	.021	.983	.510	1.960
	KesadaranWajibPajak	.377	.147	.331	2.570	.012	.517	1.935

a. Dependent Variable: KepatuhanWajibPajak

1. Variabel pengetahuan perpajakan (X1) dengan nilai signifikansi sebesar 0,103 > 0,05 dan nilai t_{hitung} 1,645 < t_{tabel} 1,98525. Dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).
2. Variabel akuntabilitas pelayanan publik (X2) dengan nilai signifikansi 0,188 > 0,05 dan nilai t_{hitung} 1,325 < t_{tabel} 1,98525. Dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas pelayanan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).
3. Variabel sanksi perpajakan (X3) dengan nilai signifikansi 0,983 > 0,05 dan nilai t_{hitung} 0,021 < t_{tabel} 1,98525. Dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

4. Variabel kesadaran wajib pajak (X4) dengan nilai signifikansi $0,012 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 2,570 > t_{tabel} 1,98525$. Dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Koefisien Deteminasi (R_2)

Tabel 14 Uji iKoefisien iDeteminasi i(R_2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.431 ^a	.185	.151	.36994

a. Predictors: (Constant), KesadaranWajibPajak, AkuntabilitasPelayananPublik, PengetahuanPerpajakan, SanksiPerpajakan

b. Dependent Variable: KepatuhanWajibPajak

Maka hasil Koefisien determinasi (R_2) antara variabel independen 0,431 dengan koefisien detreminasi *adjusted R square* sebesar 0,185 maka dinyatakan variasi kepatuhan wp mampu dijelaskan oleh variabel pengetahuan perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak sejumlah 15,1% yang tersisa 84,9% adalah kontribusi variabel lain yang tidak dimasukkan.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan (X1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Perolehan pengujian hipotesi pengetahuan perpajakan menunjukkan nilai signifikansi $0,103 > 0,05$ $t_{hitung} 1,645 < t_{tabel} 1,98525$. Diputuskan X_1 tidak mrmiliki pengaruh signifikan mengenai kepatuhan WP (Y). Sebagian besar responden menyatakan sangat setuju (ST) berdasarkan hasil jawaban variabel Pengetahuan Perpajakan. Tingkat pengetahuan WP yang beda sangat berdampak penilaian mereka untuk berperilaku sesuai dengan kewajiban pajak mereka. Hasil penelitian searah dengan penelitian (Nurafiza et al., 2024).

Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan Publik (X2) Terhadap Kepatuhan WP Orang Pribadi

Hipotesis kedua yaitu Akuntabilitas Pelayanan Publik. Diketahui hasil uji t, akuntabilitas pelayanan publik (X2) mengenai kepatuhan wajib pajak (Y) dengan signifikansi $0,188 > 0,05$ dan $t_{hitung} 1,325 < t_{tabel} 1,98525$. disimpulkan akuntabilitas

memiliki, terlihat responden menjawab setuju (S). Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya yaitu ketidak puasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Hasilnya tidak sinkron dengan penelitian (Fera, 2020) , dan penelitian ini sejalan dengan (Wiranti, 2022)

Pengaruh Sanksi Perpajakan (X3) Terhadap Kepatuhan WP Orang Pribadi

Menunjukkan tidak berdampak signifikan dengan signifikansi $0,983 > 0,05$, $t_{hitung} 0,021 < t_{tabel} 1,98525$. Dinyatakan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan mengenai kepatuhan wajib pajak (Y). Sesuai tanggapan dari kuesioner variabel X3 terlihat responden menjawab setuju (S). Dengan tingkat sanksi yang lebih rendah. Akibatnya, sanksi tidak berdampak. Temuan ini tidak sejalan bersama (Siringoringo et al., 2024) yang menyatakan pengetahuan perpajakan memiliki dampak positif, penelitian ini sejalan dengan (Ningsih & Jamil, 2021)

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X4) Terhadap Kepatuhan WP Orang Pribadi

Mengatakan angka sig $0,012 < 0,05$ $t_{hitung} 2,570 > t_{tabel} 1,98525$. Artinya adanya pengaruh kepada kepatuhan WP. Mengacu pada hasil jawaban dari responden variabel Sanksi Perpajakan terlihat rata-rata responden menjawab setuju (S) Maka dapat diartikan bahwa hal ini menyebabkan kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wp. Penelitian Sunanta & Leonardo (2021) dan (Sukma & Ismunawan, 2022) yang mengatakan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif, setudi ini tidak searah bersama (Angelina & Widodoatmodjo, 2024).

KESIMPULAN

Pemahaman pajak tidak berpengaruh signifikan atas Kepatuhan WP individu. Artinya banyak orang-orang yang tidak mengerti mengenai wajib pajak individu. Karena banyak orang tidak tahu banyak tentang sistem pajak dan manfaat membayar pajak.

Kepatuhan kurang terpengaruh signifikan melalui akuntabilitas pemerintah. Oleh karena itu, untuk memperbaiki kepercayaan wajib pajak, harus meningkatkan akuntabilitas pelayanan dalam pengelolaan pajak.

Sanksi perpajak tidak berdampak signifikan atas kepatuhan WP. Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam melunasi pajak, sanksi pajak harus ditingkatkan. Wajib pajak akan mengalami kerugian sangat besar jika sanksi menjadi lebih berat atau lebih keras.

Kesadaran WP berpengaruh signifikan mengenai Kepatuhan WP Orang. Artinya kesadaran WP ialah faktor yang penting dalam memperbaiki wajib pajak, singkatnya makin tinggi partisipasi aktif dalam melunasi kewajiban perpajakannya akan mempengaruhi naiknya kepatuhan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Angelina, R. P., & Widoatmodjo, S. (2024). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Kontemporer Akuntansi*, 4(1), 1–16.
- Fajriana, L. E. (2022). Analisis Kinerja Pemungutan Pajak Daerah Kota Dan Kabupaten Di Nusa Tenggara Barat. *Journal Aplikasi Perpajakan*, 3(1), 1–16.
- Fera, T. (2020). *Pengaruh Kesadaran, Sanksi Pajak, Manajemen Pajak, Adminitrasi Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Tabanan. Skripsi*. 1, 1–2.
- Ningsih, S., & Jamil, F. S. (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 199–208. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i1.560>
- Nurafiza, B., Kisnawati, B., & Rusdi, R. (2024). Analisis Pengaruh Digital Teknologi, Pengetahuan Pajak, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntabel: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(1), 49–61.
- Siringoringo, J. A., Sudjiman, L. S., & Waty, L. (2024). Pengaruh Religiusitas, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak. *Jurnal Ekonomika*, 11(2), 31–46.
- Sukma, T., & Ismunawan. (2022). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Surakarta. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(12), 4025–4036.
- Sunanta, S., & Leonardo, L. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 6(1), 86–95. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v6i1.710>